

EFFECTIVENESS CIVIC EDUCATION LEARNING BASED ON CONTEXTUAL PROBLEM IN IMPROVING STUDENTS' CIVIC SKILL IN CONFLICT RESOLUTION

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBASIS MASALAH KONTEKSTUAL TERHADAP PENINGKATAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN SISWA DALAM RESOLUSI KONFLIK

Robert¹, Bunyamin Maftuh², Cecep Darmawan³

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI

²Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI

³Dosen Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana UPI

Email: robertusat@gmail.com

ABSTRACT

This article has a purpose to report on whether Civic Education Learning Based on Contextual Problem can improve students' civic skills in conflict resolution as compared with conventional learning. This study used a quantitative approach with quasi-experimental methods and data was got by testing and observation. The results of this study stated that there are significant differences between Civic Education Learning Based on Contextual Problem and Conventional Learning to improve students' skills in conflict resolution with an average increase in the experimental class higher than the control class. The implication of this study is that the method of Civic Education Learning Based on Contextual Problem can be used as an alternative to improve the civic skills of students in the resolution.

Keywords: Civic Education Learning Based on Contextual Problem, Civic Skills, Conflict Resolution

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melaporkan apakah Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen kuasi dan data diperoleh melalui tes dan observasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual dengan Pembelajaran Konvensional dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik dengan rata-rata peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Implikasi dari penelitian ini bahwa metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual dapat dijadikan sebagai alternatif meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi.

Kata Kunci: Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual, Keterampilan Kewarganegaraan, Resolusi Konflik.

Masyarakat Indonesia yang majemuk potensial terjadi konflik, karena masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas-identitasnya masing-masing. Secara tidak sadar masyarakat suatu suku bangsa, agama atau kelompok akan mengembangkan ikatan-ikatan yang bersifat primordial, yaitu loyalitas berlebihan yang mengutamakan atau menonjolkan kepentingan

suatu kelompok agama, ras, daerah, atau keluarga tertentu. Identifikasi inilah yang menentukan individu-individu yang termasuk dalam *ingroup* dan *outgroup* yang sering menjadi kekuatan-kekuatan yang berkonflik (Deutsch, Coleman Marcus, 2006; Wiriaatmadja, 2002; Maftuh, 2008).

Belajar dari pengalaman konflik yang terjadi di Indonesia dan terus berulang meskipun

berbagai upaya telah dilakukan, kita perlu merujuk pada pandangan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1990). Berger memandang masyarakat sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat, maka untuk melakukan pembenahan kondisi *socio-cultural* masyarakat dapat melalui pendidikan.

Pendidikan merupakan wahana yang efektif untuk membentuk generasi yang lebih toleran terhadap berbagai kemajemukan serta dapat meminimalisasi potensi konflik yang terjadi. Pendidikan sekolah dipandang strategis sebagai agen peubah masyarakat dalam menumbuhkembangkan budaya positif tertentu maupun politis kenegaraan (Wiriaatmadja, 2002: 220; Atmadja, 2010).

Dalam konteks faktual di lapangan, sekolah sebagai subsistem sosial tidak bebas dari konflik yang terjadi antarwarganya, khususnya konflik yang dialami siswa, namun pemahaman siswa tentang konflik masih sangat rendah, siswa memahami konflik hanya secara parsial tanpa mengetahui esensi apa dan bagaimana konflik tersebut (Maftuh, 2004: 355). Sehubungan dengan konflik yang pernah dan akan terjadi pada setiap individu, ternyata tidak semua individu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap menyelesaikan konflik secara positif. Selama ini kecenderungan seseorang menggunakan beberapa cara tertentu untuk memecahkan konflik seperti; menyerah begitu saja dengan segala kerendahan hati, melarikan diri dari persoalan yang mengakibatkan konflik, membalas musuh dengan kekuatan dan kekerasan yang jauh lebih dahsyat, menuntut melalui jalur hukum, dan sebagainya. Ternyata cara-cara tersebut sering tidak efektif dan selalu ada yang menjadi korban.

Kecenderungan generasi muda sekarang ini adalah semakin banyaknya generasi muda yang terlibat dalam kekerasan, bahkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu, berbagai konflik terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mensikapi perubahan ini, kompetensi siswa dalam resolusi konflik sangat penting sebagai upaya preventif bagi siswa sebagai generasi muda yang sangat rentan terhadap konflik (Lickona, 2013; Maftuh, 2004).

Selama ini siswa dibatasi dari konflik dalam dinamika perkembangan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, konflik-konflik dalam masyarakat dianggap belum pantas untuk dipelajari, dikarenakan berbagai faktor

kerawanan dan sensitivitas konflik. Fakta menunjukkan bahwa konflik berbasis kekerasan di sekolah bisa menjadi bencana kemanusiaan yang cenderung berkembang dan meluas baik dari segi isu maupun para pelakunya. Namun, upaya meningkatkan keterampilan resolusi konflik kepada siswa saat ini cenderung bersifat parsial. Hal demikian berdampak pada kompetensi siswa atau warga negara tidak mencapai tujuan dan harapan bangsa. Dengan kata lain, hal yang dipahami siswa mengenai resolusi konflik sebatas pada *knowledge*, tidak mencapai pada menjadi *skill* dan membentuk *disposition* siswa, karena model, strategi, pendekatan, dan metode pengajaran yang dilakukan oleh guru terbatas pada bentuk konvensional yang ragu-ragu mencerminkan realitas (Komalasari, 2013; Sumardianta, 2013). Karena itu perlu pembelajaran berbasis masalah kontekstual untuk mendorong aktivitas siswa kepada upaya memahami konflik, mengidentifikasi konflik, dan menyelesaikan konflik oleh siswa secara kooperatif dan komprehensif.

Tindak kekerasan merupakan hal yang sangat tidak diinginkan semua pihak, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyelesaikan masalah secara damai dan edukatif. Namun kenyataannya masih banyak, bahkan hampir semua sekolah belum dapat memberikan hak anak, bahkan melakukan kekerasan terhadap anak. Guru biasa mencubit, memukul anak-anak bahkan menghina mereka, baik di sekolah-sekolah negeri maupun sekolah yang berbasis keagamaan. Hukuman secara fisik dan emosional dari guru terhadap murid merupakan hal yang lumrah terjadi di dalam sistem pendidikan di Indonesia. Banyak guru belum menyadari bahwa hal ini sebetulnya berdampak buruk pada psikis anak dan dapat menjadi pemicu sikap anarkis anak. Tanpa disadari hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak.

Urgensi program peningkatan kompetensi siswa dalam resolusi konflik melalui pendidikan di sekolah tersebut sejalan dengan beberapa pendapat ahli dalam pernyataannya berikut ini. Dalam pembahasan peran konselor di abad ke-21, dinyatakan bahwa tema-tema konseling masa depan yang urgen diantaranya adalah “konseling

resolusi konflik”. Johnson and Johnsons (Erford, 2004: 363), setelah lebih dari 30 tahun melakukan penelitian menyatakan, “*Most students do not know how to manage their conflict constructively*”. Demikian halnya dengan *The Centers for Disease Control and Prevention* menyatakan bahwa kekerasan telah mencapai proporsi sebagai “*epidemic*”, oleh karena itu semua siswa perlu dilibatkan dalam program-program resolusi konflik. Bahkan *The American School Counselor Association* (ASCA) telah mendeklarasikan bahwa, “*a comprehensive conflict Resolution Program promotes safe school environment that permits optimal personal growth and learning*” (Erford, 2004).

Dalam beberapa tahun terakhir, sistem pendidikan di seluruh dunia juga telah mengembangkan kerangka kerja dengan peningkatan penekanan pada pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk sukses di abad ke-21. Mereka melibatkan aspek keterampilan dan pemahaman, tapi banyak dari mereka menekankan kecenderungan, seperti rasa ingin tahu, kreativitas, dan kolaborasi. Sebuah laporan yang disiapkan untuk *Asia Society Global Cities Education Network Symposium*, yang diselenggarakan di Hong Kong pada Mei 2012, tentang definisi keterampilan abad ke-21 dan mengapa dan bagaimana siswa harus diajarkan, yang ditulis oleh Saavedra & Opfer (2012: 6) mengatakan:

“They need to be able to solve problems so they can propose or review policies to address social challenges. They need to be able to work with others if they are to effectively serve as jurors or participate in political campaigns. They need to be able to communicate effectively orally and in writing so that they can share their opinions publicly, defend their rights, propose new policy.”

Selanjutnya, *Civic Education Policy Study* (CEPS) sebuah proyek penelitian jaringan internasional dilakukan pada akhir tahun 1990, dirancang untuk menguji perubahan karakter kewarganegaraan di atas dua puluh lima tahun ke depan dan implikasi berikutnya dari perubahan ini untuk kebijakan pendidikan di sembilan masyarakat peserta: Jepang, Thailand, UK,

Germany, Greece, Hungary, the Netherlands, Canada, dan USA (Karsten, et al., 2002; Budimansyah & Suryadi, 2008). Tim yang diketuai John J. Cogan menunjukkan bahwa warga negara harus terbuka untuk bekerja dan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai pengaturan, harus mampu berpikir secara lokal, nasional, dan global, dan mampu bekerja dengan orang yang beragam. Rekomendasi utama dari CEPS adalah bahwa kebijakan pendidikan, dalam segala aspeknya, harus didasarkan pada visi kewarganegaraan multidimensi. Studi ini menemukan bahwa tantangan awal abad ke-21, membutuhkan visi yang lebih komprehensif kewarganegaraan yang bersifat multidimensi. Multidimensional kewarganegaraan dimaksudkan untuk menggambarkan konseptualisasi multifaset kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan yang akan diperlukan warga untuk mengatasi tantangan dekade pertama abad ke-21.

Relevansi kompetensi siswa dalam resolusi konflik untuk meningkatkan keterampilan pribadi sosialnya dapat diidentifikasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Dalam pasal 3 dinyatakan fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian halnya tujuan pendidikan nasional salah satu diantaranya adalah, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya pengembangan Kurikulum 2006 (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 dengan dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke-21 yang ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, *knowledge-based society* dan kompetensi masa depan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian integral dalam sistem pendidikan di Indonesia, tentu memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka pembinaan kehidupan multikultural dan sekaligus sebagai program pendidikan karakter bangsa (*nation and character building*). Secara programatik, misi Pendidikan Kewarganegaraan menurut Budimansyah dan Suryadi (2008: 68) “... merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.”

Pembelajaran berbasis masalah kontekstual (Pembelajaran Berbasis Masalah) merupakan pembelajaran atau pendekatan holistik yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan keterampilan resolusi konflik siswa dan memahaminya secara kooperatif. Departemen Pendidikan Nasional (2003: 4) menyatakan:

“Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan strategi pembelajaran menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari mata pelajaran. Dalam hal ini siswa terlibat dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai materi pelajaran. Strategi ini mencakup pengumpulan informasi berkaitan dengan pertanyaan, menyintesa, dan mempresentasikan penemuannya kepada orang lain.”

Dengan demikian, masa pembelajaran ini juga merupakan wahana pendewasaan diri dan latihan menyelesaikan masalah yang natural.

Dalam sebuah prosiding yang diselenggarakan oleh program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009 (Komalasari, et al, 2010) juga menekankan bahwa dalam era globalisasi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa diisolasi dari kecenderungan globalisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia di manapun ia hidup. Prosiding tersebut memfokuskan pada tema-tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, sebagaimana hasil studi Masyitoh (2010: 85) yang berjudul “Inovasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi Melalui Penataan Situasi Sekolah sebagai Laboratorium Demokrasi” yang merekomendasikan bahwa “sekolah harus mampu menjembatani di antara dua lingkup pembelajaran yang berbasis rumah dan masyarakat”. Program Pendidikan

Kewarganegaraan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk pembelajaran berbasis masalah kontekstual, yakni pembelajaran yang diarahkan pada pengembangan siswa yang mampu mengolah krisis di sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dikaji upaya meningkatkan kompetensi siswa dalam resolusi konflik, dengan judul penelitian: “Efektivitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual Terhadap Peningkatan Keterampilan Kewarganegaraan Siswa Dalam Resolusi Konflik.”

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara.

Pendekatan kuantitatif ini dilakukan melalui metode eksperimen, yaitu bentuk yang menggunakan *treatment*. Bentuk eksperimen yang digunakan adalah kuasi eksperimen (*quasi experiment*), yaitu partisipan tidak ditentukan secara acak (*nonrandomly assignment*), berarti partisipan ditentukan.. Sampel dalam penelitian ini ialah kelas X Administrasi Perkantoran sebagai kelas eksperimen dan kelas X Akuntansi sebagai kelas kontrol.

Prosedur bentuk penelitian ini adalah *pretest-posttest design*. Desain yang dimaksudkan dengan *pretest* dan *posttest* tersebut terdiri dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian diawali dengan *pretest* sebelum *treatment* untuk mengontrol tingkat kesetaraan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta kontrol untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap pencapaian skor. *Posttest* diberikan setelah pelaksanaan *treatment* pada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk melihat efektifitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan dua instrument, yaitu observasi dan tes.

Pedoman observasi yang terbuka digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik selama penerapan model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual (kelas eksperimen) pada kelas eksperimen dan

Pebelajaran PKn Konvensional pada kelas kontrol. Pedoman observasi juga digunakan untuk mengamati perilaku siswa dalam menggunakan keterampilan strategi dan keterampilan resolusi konflik.

Aspek-aspek yang diobservasi selama dalam penelitian ini meliputi: (1) kemauan dan kemampuan bekerja sama, (2) kemauan dan kemampuan saling memahami perasaan, (3) penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa/kelompok, (4) konsensus yang dilakukan siswa/kelompok, (5) komunikasi aktif siswa, (6) partisipasi siswa dalam bernegosiasi dan melakukan mediasi, dan (7) hal-hal lain yang penting yang muncul dalam pengamatan.

Tes dalam penelitian ini merupakan seperangkat soal *critical thinking skill*. Tes digunakan pada tahap tes awal (*pretest*) dan tes akhir (*posttest*). Soal tes disusun dalam bentuk uraian (esai) terbuka agar dapat mengetahui apakah siswa dapat mengungkapkan pikirannya secara terbuka. Dengan soal terbuka kita akan bisa melihat dengan jelas proses berpikir melalui jawaban-jawaban yang diberikan siswa.

Peneliti menilai keterampilan berpikir, pemahaman, dan bagaimana siswa menuntun dirinya untuk bekerja dan keterlibatan siswa dalam bekerja secara tim. Jadi dalam penelitian ini, peneliti juga menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap masalah yang disajikan dan keterampilan yang telah siswa kuasai. Pengujian terhadap hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik analisis uji-t *independent sample test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata pretes keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen sebesar 46,258 dan skor rata-rata pretes kelas kontrol sebesar 47,219. Data skor rata-rata kedua kelas tersebut menunjukkan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal ini juga terlihat dalam uji komparatif (uji-t) pretes kelas eksperimen dan pretes kelas kontrol yang menunjukkan Nilai *p-value* atau sig (*2-tailed*) dari tabel di atas diketahui 0,687 lebih besar dari nilai $\sigma = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata awal keterampilan

kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen dengan rata-rata awal keterampilan kewarganegaraan siswa kelas kontrol, diterima. Artinya, kedua kelas memiliki rata-rata awal keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik yang tidak berbeda secara signifikan.

Selanjutnya, setelah dilakukan postes pada kedua kelas tersebut ternyata skor keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen meningkat dari skor rata-rata pretes sebesar 46,258 menjadi skor rata-rata postes sebesar 62,531 sama dengan N-Gain 0,29. Hal ini berarti peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen masuk dalam kategori rendah. Adapun pada kelas kontrol juga meningkat tetapi relatif kecil yaitu dari nilai rata-rata skor pretes sebesar 47,219 menjadi skor rata-rata postes sebesar 54,687 sama dengan N-Gain 0,106 yaitu dalam kategori rendah. Artinya kedua kelas sama-sama mengalami peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik dalam skala rendah. Namun untuk melihat apakah peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik tersebut berbeda secara signifikan, dilakukan analisis uji perbedaan rata-rata skor N-Gain bertujuan untuk menguji hipotesis "Peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol".

Hasil membandingkan N-Gain kelas eksperimen dan N-gain kelas kontrol, menunjukkan bahwa nilai *p-value* atau sig (*2-tailed*) sebesar 0,003, lebih kecil dari nilai $\sigma = 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Artinya kedua kelas memiliki peningkatan yang berbeda secara signifikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik yang mendapat Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual lebih baik dibandingkan siswa yang mendapat Pembelajaran PKn Konvensional. Hal ini disebabkan karena peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas kontrol.

Berdasarkan hal tersebut di atas, setelah diketahui bahwa terdapat perbedaan peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol signifikan, dengan perbedaan rata-rata signifikansi N-Gain adalah dalam kategori rendah (kecil) dengan selisih 0,185, dapat disimpulkan bahwa signifikansi tersebut sangat berarti, yaitu bahwa sekecil-kecilnya perbedaan akan berdampak besar bila dilakukan dalam skala besar.

Pembahasan

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hmelo-Silver (2004), Handayani (2009), Redhana (2012), dan Komalasari (2009) yang melaporkan bahwa belajar dengan menggunakan metode Pembelajaran Berbasis Masalah Kontekstual mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan partisipasi siswa.

Gallagher dan Klopfer dalam laporan *Center for Teaching and Learning (CTL, 2001: 5)* juga mengungkapkan *Problem Based Learning (PBL)* merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah siswa. Maksudnya, siswa dapat membuat koneksi yang kuat antara konsep-konsep ketika mereka mempelajari fakta dan keterampilan secara aktif bekerja sama dengan informasi daripada secara pasif menerima informasi. Dengan penggunaan metode Pembelajaran Berbasis Masalah Kontekstual sangat potensial dalam meningkatkan keterampilan menghubungkan komponen-komponen pendidikan. Komponen-komponen tersebut termasuk ialah kurikulum, media pembelajaran, materi bahan ajar, pengalaman siswa, dan fakta masalah sosial di sekitar siswa.

Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual ini juga merupakan pendekatan yang lebih partisipatif dengan menekankan pada latihan penggunaan nalar dan logik, dengan membelajarkan siswa agar memiliki kepekaan sosial dan memahami permasalahan yang terjadi dilingkungan secara cerdas. Serta adanya tanggung jawab pribadi terhadap sesama teman dalam satu kelompok debat untuk menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi

dari mata pelajaran, keterlibatan dalam penyelidikan untuk pemecahan masalah yang mengintegrasikan keterampilan dan konsep dari berbagai materi pelajaran, mencakup pengumpulan informasi berkaitan dengan pertanyaan, menyintesa, dan mempresentasikan penemuannya kepada orang lain inilah yang juga mendorong siswa dalam belajar PKn. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli (Bern & Erickson, 2001; Komalasari, 2013; 2009; Tan dalam Rusman, 2010) yang menyatakan bahwa siswa terdorong untuk memahami lebih dalam dari suatu materi secara mandiri melalui proses kerja kelompok (mengumpulkan, menyatukan, dan mempresentasikan informasi/ penemuan) yang berorientasi pada masalah nyata di sekitarnya. Hal tersebut merupakan strategi yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan mengintegrasikan berbagai konsep dan keterampilan dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar, tetapi juga memperoleh pengalaman bagaimana menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya.

Pembelajaran ini juga turut mendorong motivasi belajar siswa karena dirasa menantang. Sejalan dengan laporan yang diungkapkan Kirtani (2014: 7) bahwa peserta didik memiliki sikap yang lebih baik terhadap pembelajaran berbasis masalah dimana kebaruan dari pendekatan seperti yang diajukan oleh instruktur membuat metode yang lebih menarik.

Diperoleh dari penelitian ini maupun penelitian-penelitian terdahulu tentulah akan mendukung tercapainya tujuan PKn yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kewarganegaraan sebagai berikut (Wahab & Sapriya, 2011: 313):

- a) *Knowledge and skills to assist in solving the problem of our times.*
- b) *Awareness of the effects of science on civilization and its use to improve the quality of life.*
- c) *Readiness for effective economic life.*
- d) *Ability to make value judgement for effective life in a changing world.*
- e) *Recognition that we live in a open-ended world wich requires receptivity to new facts, new ideas, and new ways of life.*

- f) *Participation in the process of decision-making through expression of views to representatives, expert, and specialists.*
- g) *Belief in both liberty for the individual and equality for all, as guaranteed by the constitution of the United State.*
- h) *Pride in the achievements of the United State, appreciation of the contributions of other peoples, and support for intensional peace and cooperation.*
- i) *Use of the creative art to sensitize oneself to universal human experience and to the uniqueness of the individual.*
- j) *Compassion and sensitivity for the needs, feeling, and aspirations other human beings.*
- k) *Development of democratic principles and application to daily life.*

Berdasarkan bukti yang diperoleh dari penelitian ini, maka peneliti meyakini bahwa penelitian ini turut mengokohkan penemuan-penemuan terdahulu yang melaporkan bahwa penggunaan metode Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual sangat potensial dalam meningkatkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah konflik melalui pengalaman langsung dan simulasi. Sebagaimana yang dilaporkan Atan (2005) dan Murray-Harvey *et al* (2013) menunjukkan bahwa penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran kewarganegaraan dapat meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran. Meningkatnya partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran menjadikan proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara efektif. Selain itu, melalui metode ini dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa (*civic skills*) yang dimiliki mahasiswa. Hal itu dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan melakukan analisis terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi oleh masing-masing kelompok penelitian.

Hal tersebut akan berdampak pada siswa untuk mudah mengidentifikasi masalah, mudah mengingat, meningkatkan pemahaman, meningkatkan pengetahuan yang relevan dengan praktis, kemampuan kepemimpinan dan kerja sama, keterampilan belajar, dan memiliki motivasi belajar, dengan tujuan agar siswa menjadi *a good and smart citizenship* yang berkualitas sebagai warganegara yang cerdas,

kreatif, partisipatif, prospektif dan bertanggungjawab.

Melalui penelitian ini, peneliti berharap resolusi konflik tercermin melalui PKn memberdayakan seseorang untuk memberikan makna atau arti penting pada sesuatu yang tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, *civil society*, demokrasi, dan konstitusi. Kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa dan simbol-simbol emosional juga sangat penting bagi seorang warganegara. Mereka harus mampu menangkap dengan jelas maksud-maksud hakiki dari bahasa dan simbol-simbol emosional yang digunakan (Maftuh, 2008; Payeye, 2013).

Pada dasarnya, konflik yang dialami siswa di persekolah adalah konflik yang berangkat tidak hanya dari konflik di sekolah, tetapi juga berasal dari konflik di keluarga, konflik di masyarakat, serta tantangan menghadapi konflik yang turut merekat masalah konflik menjadi lebih perlu dipecahkan secara konstruktif agar tidak menjadi konflik yang berlarut-larut dan menyensasikan. Dalam Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual sekolah perlu memasukan konflik dan pemecahan konflik yang berasal dari sumber-sumber tersebut ke dalam kurikulum maupun visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah agar sekolah dapat menyelenggarakan proses belajar yang damai. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Maftuh (2004) bahwa iklim yang damai di sekolah dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi siswa sehingga proses belajar menjadi produktif.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, secara rinci kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Pertama, Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual mampu meningkatkan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*) siswa dalam resolusi konflik secara signifikan. Rata-rata siswa mengalami peningkatan keterampilan mengumpulkan informasi sumber atau akar konflik, keterampilan menilai informasi sumber atau akar konflik, mengidentifikasi dan menilai akibat-akibat negatif dan positif yang berkaitan dengan sumber konflik, keterampilan menyampaikan ide, gagasan, atau solusi dalam upaya resolusi konflik, mau dan mampu bekerja sama (*cooperate*), membaca dan memahami

perasaan orang lain, mengatur atau menyelesaikan masalah dengan tenteram dan adil, mencapai konsensus yang sama menguntungkan (*win-win solution*), dan bernegosiasi (*negotiate*) dan mediasi. Aktifitas yang paling menonjol selama proses Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual yaitu terciptanya suasana pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa mencari sumber belajar melalui media massa, diskusi atau siswa aktif dalam pembelajaran. Partisipasi siswa dalam belajar mencari sumber melalui partisipasi siswa dalam pembelajaran berbasis Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual meningkat pada akhirnya meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik.

Kedua, Pembelajaran Konvensional juga mampu meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik hanya meningkat pada *critical thinking skill* siswa. Sedang pada *participation skill* siswa dalam resolusi konflik siswa sangat kurang mengalami peningkatan karena dalam model ini siswa pasif. Aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional ditemukan bahwa Pembelajaran PKn Konvensional kurang memperhatikan siswa sebagai subyek dalam pembelajaran dan mengandalkan guru sebagai satu-satunya sumber atau pusat pembelajaran dengan skor nilai tertinggi dari pengamatan terletak pada perhatian pada ceramah guru.

Ketiga, skor gain kelas eksperimen dengan skor gain kelas kontrol sama-sama menunjukkan adanya peningkatan. Namun skor gain kelas eksperimen lebih tinggi dari pada skor gain kelas kontrol. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan peningkatan skor gain kedua kelas berbeda signifikan. Artinya, peningkatan keterampilan kewarganegaraan siswa dalam resolusi konflik pada kelas eksperimen lebih tinggi signifikan dari pada kelas kontrol. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual berhasil beranjak dari tradisi pembelajaran PKn Konvensional yang kurang bermakna bagi siswa yang disebabkan oleh masih dominannya guru memberi ceramah. Model Pembelajaran PKn Berbasis Masalah Kontekstual menempatkan aktivitas (partisipasi)

dan pengalaman langsung sebagai salah satu bagian penting dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan. Oleh karena itulah Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Masalah Kontekstual yang menekankan pada *relating, experiencing, applying, cooperating, self-regulating*, dan *authentic assessment* lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam resolusi konflik.

DAFTAR RUJUKAN

- Atan, H., et al. 2005. The effectiveness of problem-based learning in the web-based environment for the delivery of an undergraduate physics course. *Journal of Education*. 6, (4), 2005, 430-437
- Atmadja, N.B. 2010. *Ajeg Bali; Gerakan Identitas Kultural dan Globalisasi*. LKiS: Yogyakarta.
- Bern, R.G. & Erickson, P.M. 2001. *Contextual Teaching and Learning: Preparing Students for the New Economy*. The Highlight Zone: Re-Search. NCCTE
- Budimansyah, D., & Suryadi, K. 2008. *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI Bandung.
- CTL. 2001. Speaking Of Teaching: Problem-Based Learning. *Journal of Teaching*. 11, (1), Stanford University Newsletter On Teaching
- Deutsch, M., Coleman P.T., & Marcus E.C. 2006. *The Handbook of Conflict Resolution Theory and Practice*. (2nd Ed). San Fransisco: Josey Bass.
- Erford, B. T. 2004. *Professional School Counseling*. Texas: CAPS Press.
- Handayani, S. 2009. Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning) dan Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) Tipe Jigsaw untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar, Hasil Belajar Dan Respon Belajar Siswa. *Journal Pendidikan*. 2, (1), 2009
- Hmelo-Silver, C.E. 2004. Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?. *Journal of Educational Psychology Review*. 16, (3), 235-266
- Karsten, S., et al. 2002. Citizenship Education and the Preparation of Future *Journal of*

- Citizenship Education and the Preparation of Future Teachers*. 3, (2), 168-183
- Kirtani, S. 2014. Effectiveness Of Problem Based And Lecture Based Learning Methods On Performance And Learner Attitudes In Undergraduate Arts Program. *Journal of Teaching*. 4, (5), 1-7, 2014.
- Komalasari, K. 2009 "The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Students' Civic Competence". *Journal of Social Sciences*. 5, (4), 261-270, 2009 ISSN 1549-3652
- Komalasari, K. 2013. *Pembelajaran Kontekstual*. Bandung. Refika Aditama
- Komalasari, K., et al. 2010. *Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Kewarganegaraan: Building Civic Competences In Blobal Era Through Civic Education: Problem And Prospect*. Bandung. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Lickona, T. 2013. *Educating for Character: mendidik untuk membentuk karakter*. Bumi Aksara. Jakarta
- Maftuh, B. (2004). *Implementasi Model Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas*. Disertasi tidak dipublikasikan. Bandung. SPs UPI Bandung
- Maftuh, B. 2008. *Pendidikan Resolusi Konflik*. Bandung. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs Univesitasi Pendidikan Indonesia.
- Masyitoh, I.S. 2010. *Inovasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi melalui Penataan Situasi Kelas sebagai Laboratorium Kelas*. Dalam Komalasari, K., et al. 2010. *Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Kewarganegaraan: Building Civic Competences In Blobal Era Through Civic Education: Problem And Prospect*. Bandung. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia
- Murray-Harvey, R., et al. 2013. What Teacher Education Students Learn About Collaboration From Problem-Based Learning. *Journal of Problem Based Learning*. 1, (1), 2013, 114-134
- Payeye, J., et al. 2013. Conflict Resolution and Conflict Transformation: Some Reflections. *Jurnal Kajian Pendidikan*. 3, (1), 2013
- Redhana, I.W. 2012. Model Pembelajaran Berbasis Masalah Dan Pertanyaan Socratic Untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *Jurnal Pendidikan*, 10, (3), 351-365
- Rusman. 2011. *Model – Model Pembelajaran: Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Saavedra, R.S., & Opfer, V. D. 2012. *Teaching And Learning 21st Century Skills: Lessons from the Learning Sciences*. Asia Society. RAND Corporation
- Sumardianta. J. 2013. *Guru Gokil Murid Unyu*. Yogyakarta. Bentang Pustaka
- Wahab, A.A., & Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung. Alfabeta
- Wiriaatmadja, R. 2002. *Pendidikan Sejarah di Indonesia*. Historia Utama Press. Bandung.
- Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional